**MODEL KONSEPTUAL SISTEM DAN KESISTEMAN PENYELENGGARAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

Muhamad Nur Afandi

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial

Universitas Pasundan Bandung

**Abstrak**

Penelitian ini fokus pada persoalan pemahaman sistem dan kesisteman penyelenggaraan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian bertujuan (1). Mengkaji dan menganalisis struktur dari sistem dan kesisteman penyelenggaraan RPJMD, (2). Mengetahui komponen-komponen dalam struktur sistem dan kesisteman penyelenggaraan RPJMD, (3). Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam sistem dan kesisteman penyelenggaraan RPJMD, (4). Mengetahui bagaimana model konseptual untuk mengatasi diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang tidak berbasis sistem dan kesisteman, agar penyelenggaraan RPJMD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan penelitan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode soft system methodology (SSM). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan *focus group discussion* (FGD). analisis yang digunakan dalam soft system methodology (SSM) menggunakan analisis CATWOE (*customer, actor, tranformasi, wordview, owner & environmental constraints),* 3E (*efficacy, efficiency & effectiveness,* analisis peran, sosial dan politik*.*

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1). Struktur dari sistem dan kesisteman penyelenggaraan RPJMD di Kabupaten Cirebon, Kota Bandung dan Kabupaten Garut terdiri atas komponen-komponen dan pola keterkaitan dari struktur, sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017. (2). Komponen-komponen dari struktur sistem dan kesisteman penyelenggaraan RPJMD terdiri atas komponen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD, (3). Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan RPJMD di Kabupaten Cirebon, Kota Bandung dan Kabupaten Garut adalah adanya intervensi sistem berupa dinamika regulasi yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan baru dalam proses pelaksanaan RPJMD, (4). Konstruksi model konseptual untuk mengatasi diberlakukannya peraturan peraturan perundang-undangan yang tidak berbasis sistem dan kesisteman, dapat digunakan pada kondisi yang tidak ideal dalam penyelenggaraan RPJMD.

Saran dalam penelitian ini adalah penerapan model konseptual dapat digunakan untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan RPJMD di Kabupaten Cirebon, Kota Bandung dan Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, Kota Bandung dan Kabupaten Garut dapat melakukan penguatan dalam hal *organizational learning, aspek* kontroling dan monitoring dalam penyelenggaraan RPJMD agar dapat merealisasikan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: model konseptual, sistem, rencana pembangunan jangka menengah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, F. (2013). *Teori dan konsep administrasi: dari pemikiran paradigmarik menuju redefinisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktek*.

Checkland, P. dan J. P. (2006). *). Learning for action: A short definitive account of soft system methodology and its use for practitioners, theachers and students*. *Chichester: John wiley an sons*

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lai, L. W. C., Ho, D. C. W., Chau, K. W., & Chua, M. H. (2016). Repeated planning applications by developers under statutory zoning: A Hong Kong case study of delays and design improvements in private residential development. *Land Use Policy*, *57*, 709–718. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.031

Lukiswara, H. (2016). Analisis perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan sistem lunak di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, *2*(4), 216–226.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Graindo Persada.

Polzin, F., Migendt, M., Täube, F. A., & von Flotow, P. (2015). Public policy influence on renewable energy investments-A panel data study across OECD countries. *Energy Policy*, *80*, 98–111. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.01.026

Rusli, Budiman. (2015). Isu-isu krusial administrasi pulbik konteporer, Edisi Revisi, cetakan Ke-2. Bandung. Mega Rancage Press

Rusli, B. (2015). *Kebijakan public: membangun pelayanan public yang responsif*. bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera.

Syaodih, Ernady. (2015). Manajemen Pembangunan kabupaten dan Kota. Bandung. PT. Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pembangunan. Bandung. PT. REfika Aditama.

Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era reformasi. Jakarta. PT. Raja Graindo Persada.

Solihin, Dadang & Radjab Semendawai. (2013). Optimalisasi otonomi daerah: Kebijakan, Strategi dan Upaya. Jakarta. Yayasan empat salemba.

Vogt, S., & Haas, A. (2015). The future of public participation in Germany: Empirical analyses of administration experts’ assessments. *Technological Forecasting and Social Change*, *98*, 157–173. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.013

Wagner, S. A., Vogt, S., & Kabst, R. (2016). The future of public participation: Empirical analysis from the viewpoint of policy-makers. *Technological Forecasting and Social Change*, *106*, 65–73. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.02.010

Yuliar, Soni. (2015). Tata kelola teknologi: Perspektif teori dan jaringan aktor. Edisi revisi Cetakan Ke-2. Bandung. Penerbit ITB.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional